

**PARTISIPASI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)  
PASCA-PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN  
PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA (RI) DAN GAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S-1)  
Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**AJRIAL ADRUS**  
**2002 052 0052**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2007**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi Ini Telah Dipertahankan dan Disahkan di Depan Tim Penguji  
Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Pada  
Hari/Tanggal : Rabu/31 Januari 2007  
Tempat : Ruang Pendadaran**

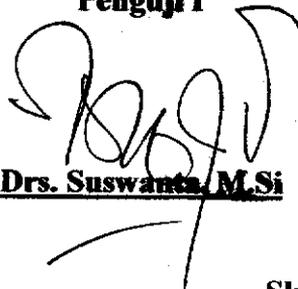
**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua**



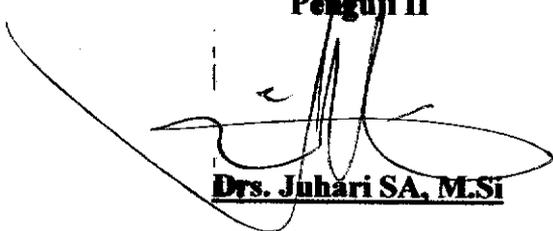
**Arrohman Mardiansyah, S.IP**

**Penguji I**



**Drs. Suswanta, M.Si**

**Penguji II**



**Drs. Juhari SA, M.Si**

**Skripsi Ini Telah Diterima  
Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Strata 1 (S-1)  
Tanggal : 10 Februari 2007**



**Drs. Suswanta, M.Si  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

## PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni dari hasil kerja penulis sendiri. Sepengetahuan penulis, selama ini belum ada satu pun mahasiswa yang membuat skripsi dengan judul yang sama maupun penelitian-penelitian lainnya dalam kasus yang sama. Dalam menulis skripsi ini, penulis hanya mengambil sebagian dari beberapa teori dan pendapat para ahli. Apabila ada mahasiswa atau pihak manapun yang merasa dirugikan dengan skripsi ini, penulis siap bertanggungjawab dan menerima konsekuensi apa pun, termasuk lewat jalur hukum, asalkan ada bukti-bukti yang kuat dan konkrit.

**Yang Membuat Pernyataan,**

  
**Ajrial Adrus**  
**Penulis**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*"Tiada Tuhan Selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Adalah Utusan-Nya"*

Dimana ketidakadilan itu ada, disana perlawanan itu muncul. Aceh lebih ironis lagi, ketika dilanda konflik selama lebih kurang 30 tahun akibat pemberontakan GAM, Aceh kemudian di "sapu bersih" oleh tsunami.

Masa depan Aceh kemudian ditentukan oleh butir demi butir dalam nota kesepahaman perdamaian Helsinki, yang ditandatangani oleh pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu. Akan tetapi, adakah jaminan masa depan Aceh yang lebih baik? Jawabannya tergantung pada komitmen keduabelah pihak.

Pada sisi lain, bagaimana "nasib" GAM selanjutnya? Organisasi yang awalnya menuntut kemerdekaan bagi Aceh ini kemudian harus berganti haluan. Dari sinilah kemudian penulis merasa tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk skripsi. Hasilnya sekarang ada ditangan anda, yang penulis beri judul ***"PARTISIPASI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) PASCA-PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) DAN GAM"***.

Skripsi ini bukanlah hasil akhir, akan tetapi masih membutuhkan kajian-kajian lanjutan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap nantinya, ada pihak-pihak yang bersedia memberikan sumbangsih pikirannya dalam bentuk kritik dan saran, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak/individu-individu yang selama ini telah banyak berbuat baik kepada penulis selama menuntut ilmu di Yogyakarta, diantaranya adalah:

1. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Bambang Eka C.W, S.IP, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Drs. Suswanta, M.Si dan Ibu Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si, selaku ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Arrohman Mardiansyah, S.IP, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Drs. Suswanta, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Drs. Juhari SA, M.Si selaku dosen penguji II
6. Bapak Asnawi Ali, tokoh pemuda Aceh yang saat ini bermukim di Stockholm, Swedia, yang tidak pernah berhenti mengirim e-mail kepada penulis tentang informasi-informasi terbaru dari Aceh
7. Teman-teman eksponem aktivis Komisarium Mahasiswa Bersama (KOMBERS) 2003-2006
8. Teman-teman aktivis Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LAMDA)
9. Bapak Daliman (Dukuh) beserta seluruh Masyarakat Gesikan 3, Wijirejo, Pandak, Bantul, tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
10. Yayasan Laper Indonesia, tempat penulis melaksanakan Internship
11. Teman-teman penulis selama melaksanakan KKN dan Internship: Ari (Medan), Dayat (Bangka), Deno (Bekasi), Fadlun (Sulut), Herman (Jambi), Lianah (Purbalingga), Rhiza (Yogya), Sofiah (Tasikmalaya) dan Trubus (Rembang)
12. Teman-teman di kelas A Ilmu Pemerintahan (dan juga di konsentrasi Ilmu Politik) 2002, terutama buat Alm. Hendri (Lampung) yang harus kembali pada sang Khaliq disaat kita mulai berteman dengan akrab
13. Teman-teman di Ikatan Pelajar Mahasiswa Pangean Yogyakarta (IPERMAPAYO)

14. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Forum LSM DIY, Jaringan Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (JangKep) serta Keluarga Besar Mahasiswa Aceh Yogyakarta
15. Bu Mursih & keluarga atas rumah kontrakan dan warung makannya, Bu Nanik & keluarga atas rumah pondokannya selama penulis melaksanakan KKN, Pak Aman yang setiap pagi mengantarkan koran buat penulis serta Munir alias Mo dkk yang pernah mengajak penulis menjual nasi goreng di seputaran kampus UMY terpadu
16. Indra Kaswadi, Asra Diswan, Adi Kurniawan, Rizki SN dan teman-teman di Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Pelalawan (IPRY-KP)
17. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Ucok (Medan), Joe (Lampung), Trubus (Rembang) dan Dayat (Bangka). Bantingan teruuuuus.....
18. Serta pihak-pihak/individu-individu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini

*"Skripsi Ini Belum Pantas Mengantarkan Penulis Menjadi Seorang Serjana!"*

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Februari 2007

Penulis

  
Ajrial Adrus

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
SINOPSIS .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Kerangka Dasar Teori .....	15
1. Partisipasi Politik .....	16
2. Gerakan Sosial .....	22
3. Partai Politik.....	25
4. Teori Konflik.....	31
E. Definisi Konseptual .....	34
F. Definisi Operasional.....	35
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis dan Metode Penelitian.....	36
2. Jenis Data .....	37
3. Unit Analisis Data .....	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	39
1. Keadaan Wilayah .....	39
2. Sejarah.....	40
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	45
B. Gambaran Umum Gerakan Aceh Merdeka.....	50
1. Dasar Hukum .....	50
2. Sejarah.....	51
3. Struktur dan Wilayah Kekuasaan.....	55
4. Komite Peralihan Aceh (KPA).....	56
<b>BAB III PARTISIPASI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) PASCA-PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) DAN GAM.....</b>	<b>58</b>
A. Agenda Politik Aceh .....	59

1. Masa Pemerintahan Soekarno .....	59
2. Masa Pemerintahan Soeharto .....	59
3. Masa Pemerintahan B.J Habibie .....	60
4. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid .....	60
5. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri .....	61
6. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono .....	62
B. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) .....	67
C. Partisipasi Politik GAM Pasca-Penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian Antara Pemerintah RI dan GAM .....	84
1. Sebelum Pilkada Aceh 11 Desember 2006 .....	84
2. Pilkada Aceh 11 Desember 2006 .....	96
3. Pasca-Pilkada Aceh 11 Desember 2006.....	118
BAB IV PENUTUP .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pasal Yang Mengatur Tentang Partai Politik Lokal Bagi Propinsi NAD Dalam RUU Pemerintahan Aceh.....	12
Tabel 2.1	PDRB Propinsi NAD Tahun 2004 (Dalam Juta Rupiah).....	48
Tabel 2.2	Produksi Perikanan Propinsi NAD (Dalam Ton/Tahun).....	49
Tabel 3.1	Hasil Perhitungan Cepat ( <i>Quick Count</i> ) Oleh Beberapa Lembaga Survei Independen Terhadap Hasil Pilkada Untuk Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2006.....	106

## SINOPSIS

Suhu politik di Aceh selalu memanas. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Aceh sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 1945 adalah pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Daud Beureueh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Muhammad Hasan Tiro, tidak akan pernah luput dari catatan sejarah bangsa ini. Semuanya bermuara pada bentuk kekecewaan yang telah terakumulasi dari sebab sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pusat yang sentralistik. Akibatnya, distribusi kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah pusat tidak pernah tersentuh oleh rakyat Aceh yang daerahnya kaya akan hasil bumi. Pemerintah pusat pun salah langkah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Aceh, yaitu dengan menggunakan pendekatan represif. Masa depan Aceh semakin buram. Namun, sejarah berkata lain. Bencana alam berupa tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004 lalu menjadi inspirasi bagi GAM dan pemerintah RI untuk segera mengakhiri konflik yang berujung pada penandatanganan nota kesepahaman perdamaian yang berlangsung di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perjanjian tersebut kemudian mengatur bentuk partisipasi politik bagi rakyat Aceh, termasuk GAM, yaitu partai politik lokal dan jalur perseorangan. Bagi GAM, pilihannya diantara 2 (dua) opsi tersebut. Oleh karena itu, *Bagaimana Partisipasi Politik GAM Pasca-Penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian Antara Pemerintah RI dan GAM?*

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *deskriptif*. Dengan begitu, seluruh data pendukung dalam penelitian ini merupakan data skunder dan menjadikan GAM (secara organisasional) sebagai unit analisis data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dari berbagai sumber yang akurat dan dianalisis secara *interpretatif*.

Nota kesepahaman perdamaian Helsinki akhirnya menghasilkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang salah satunya mengatur tentang partisipasi politik rakyat Aceh. GAM kemudian membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah proses transformasi GAM dari sebuah gerakan separatis menjadi organisasi sipil biasa. KPA menjalankan kegiatan-kegiatan sosial bagi anggota-anggotanya dan juga rakyat Aceh. Dalam pilkada Aceh 2006, GAM mengambil sikap netral dengan memberikan hak-hak politik bagi anggota-anggotanya berupa hak memilih dan dipilih. Secara mengejutkan, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, mantan anggota GAM yang mencalonkan diri secara perseorangan, memenangi pilkada tersebut. Kedepan, GAM akan segera membentuk partai politik lokal. Hingga saat ini, keinginan tersebut belum bisa direalisasikan, karena Peraturan Pemerintah (PP) tentang partai politik lokal belum disahkan dan UU tentang partai politik belum direvisi.

Bentuk partisipasi politik GAM pasca-penandatanganan nota kesepahaman perdamaian Helsinki adalah bentuk konvensional. Oleh karena itu, semua pihak harus memberi apresiasi sekaligus dukungan terhadap sikap GAM tersebut.